

Perbandingan Sidan Umum Fretilin 1975 dengan Parlamento Nacional Timor-Leste Sekarang

Damião da Silva*, Americo Pereira Monteiro, Noemia F. de Sousa Guterres, Reinaldo F.Luis

Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

Email: forsakoromoko@gmail.com*, Americopereiramonteiro714@gmail.com, sousaemy262@gmail.com

Keywords:

1975 General Election; National Parliament; FRETILIN; Timor-Leste Democracy; People's Sovereignty; Role Of Women

ABSTRACT

This study aims to compare the General Session of FRETILIN in 1975 with the National Parliament of Timor-Leste for the period 2023-2028 to see the change in the people's representative institutions from the era of revolution to the era of constitutional democracy. The method used is a qualitative comparative literature study with the approach of political history and constitutional science. Primary data for 1975 were obtained from the RDTL Proclamation of November 28, 1975, the Aileu General Resolution of May 20, 1975, and the CAVR report (Chega!). The 2026 data was obtained from the 2002 RDTL Constitution, the National Parliament Regimento, the official <http://www.parlamento.tl> website, and the 2024 Parline IPU data. The results of the study reveal six fundamental differences: legitimacy shifted from a revolutionary proclamation without elections to the 2023 election with 860,000 voters; the structure from centralistic and legislative-executive functions to a separation of powers with a 5-person Leadership Table and 9 Permanent Commissions; women's representation increased from zero to 35.4% (23 members) with the first female president of parliament; the supervisory function from non-existent to an instrument of interpellation, the right of inquiry, and the rejection of the State Budget; the security context of the civil war and the threat of invasion in the Aileu forest became a condition of peace with the trial in Dili; and the relationship with the people from a moral-ideological bond without accountability to a constitutional relationship through elections and recess. The study concluded that the 1975 General Election was the forerunner of sovereignty, while the National Parliament was its institutionalization, with FRETILIN transforming from a sole ruler to an opposition with 19 seats.

Kata kunci:

Sidan Umum 1975; Parlamento Nacional; FRETILIN; Demokrasi Timor-Leste; Kedaulatan Rakyat; Peran Perempuan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membandingkan Sidan Umum FRETILIN tahun 1975 dengan Parlamento Nacional Timor-Leste periode 2023-2028 untuk melihat perubahan lembaga perwakilan rakyat dari era revolusi ke era demokrasi konstitusional. Metode yang digunakan adalah studi literatur komparatif kualitatif dengan pendekatan sejarah politik dan ilmu ketatanegaraan. Data primer 1975 diperoleh dari Proklamasi RDTL 28 November 1975, Resolusi Sidan Umum Aileu 20 Mei 1975, dan laporan CAVR (Chega!). Data 2026 diperoleh dari Konstitusi RDTL 2002, Regimento Parlamento Nacional, website resmi <http://www.parlamento.tl>, dan data IPU Parline 2024. Hasil penelitian mengungkap enam perbedaan

fundamental: legitimasi bergeser dari proklamasi revolusioner tanpa pemilu menjadi pemilu 2023 dengan 860.000 pemilih; struktur dari sentralistik merangkap fungsi legislatif-eksekutif menjadi pemisahan kekuasaan dengan Meja Pimpinan 5 orang dan 9 Komisi Permanen; representasi perempuan meningkat dari nol menjadi 35,4% (23 anggota) dengan presiden parlemen perempuan pertama; fungsi pengawasan dari tidak ada menjadi instrumen interpelasi, hak angket, dan penolakan APBN; konteks keamanan dari perang saudara dan ancaman invasi di hutan Aileu menjadi kondisi damai dengan sidang di Dili; serta hubungan dengan rakyat dari ikatan moral-ideologis tanpa akuntabilitas menjadi hubungan konstitusional melalui pemilu dan reses. Penelitian menyimpulkan bahwa Sidan Umum 1975 merupakan cikal bakal kedaulatan, sementara Parlamento Nasional adalah pelembagaannya, dengan FRETILIN bertransformasi dari penguasa tunggal menjadi oposisi dengan 19 kursi.

PENDAHULUAN

Transformasi institusi politik Timor-Leste dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era demokrasi konstitusional merupakan proses historis yang mencerminkan perubahan mendasar dalam konsepsi kedaulatan rakyat. Pada 20 Mei 1975, FRETILIN menyelenggarakan Sidan Umum di Aileu sebagai respons terhadap krisis politik internal pasca runtuhnya UDT dan ancaman dekolonisasi yang belum tuntas. Forum ini bukan parlemen dalam arti modern, melainkan kongres partai pembebasan yang mengambil alih fungsi legislatif-eksekutif secara darurat. Melalui Sidan Umum tersebut FRETILIN memproklamasikan kemerdekaan sepihak 28 November 1975, memilih Francisco Xavier do Amaral sebagai Presiden dan Nicolau Lobato sebagai Perdana Menteri, serta membentuk Dewan Menteri berdasarkan Pasal 40 Konstitusi RDTL 1975. Namun legitimasi Sidan Umum bersifat revolusioner: lahir dari mobilisasi massa dan klaim mewakili “suara rakyat tertindas”, bukan dari pemilu demokratis, dan hanya bertahan beberapa minggu sebelum invasi Indonesia 7 Desember 1975 membubarkan struktur pemerintahan tersebut (Arquivo & Museu da Resistência Timorese, 1975).

Lima dekade kemudian, Timor-Leste merdeka 20 Mei 2002 dan membentuk Parlamento Nacional sebagai órgão de soberania sesuai Konstitusi 2002. Parlemen ini terdiri 65 anggota yang dipilih melalui pemilu universal, bebas, langsung, dan rahasia dengan sistem proporsional daftar partai metode D'Hondt untuk masa jabatan 5 tahun. Komposisinya pluralistik: Parlemen ke-6 hasil pemilu 21 Mei 2023 diisi CNRT 31 kursi, FRETILIN 19 kursi, PD 6, KHUNTO 5, PLP 4. Fungsi dan wewenangnya jelas terpisah dari eksekutif-yudikatif, dengan komisi permanen untuk pengawasan, pembahasan RUU, dan evaluasi petisi rakyat. Representasi perempuan juga meningkat signifikan menjadi 23 dari 65 anggota atau 35,4%, termasuk Presiden Parlemen Maria Fernanda Lay.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek tertentu dari perjalanan politik Timor-Leste. Dunn, (1996) dan Nicol, (2002) mendokumentasikan secara rinci peristiwa Sidan Umum 1975 dalam konteks perang saudara dan dekolonisasi, namun belum membandingkannya dengan lembaga parlemen modern. (Belo, 2014) menganalisis kontinuitas dan perubahan representasi politik Timor-Leste, tetapi masih terbatas pada periode awal kemerdekaan. Sementara itu, (CAVR, 2005) melalui laporan Chega!

memberikan dokumentasi faktual tentang peristiwa 1975 tanpa analisis komparatif kelembagaan. Penelitian tentang parlemen pasca-2002 lebih banyak berfokus pada kinerja legislasi dan pengawasan (Kent, 2012; La'o Hamutuk, 2023), tanpa mengaitkannya secara sistemik dengan cikal bakal kelembagaan di masa revolusi.

Perbedaan konteks inilah yang menjadi inti masalah penelitian. Sidan Umum 1975 lahir dalam situasi perang saudara, darurat militer, dan tanpa pengakuan internasional, sehingga mekanismenya sentralistik, non-partisipatif, dan terintegrasi dengan struktur komando gerilya FRETILIN. Sementara Parlamento Nacional 2026 beroperasi dalam kondisi damai, konstitusional, dan diakui PBB, dengan mekanisme check-and-balance serta keterbukaan publik. Namun terdapat benang merah: FRETILIN sebagai aktor utama 1975 kini tetap menjadi partai terbesar kedua di parlemen dengan 19 kursi, meski beralih status dari penguasa tunggal menjadi oposisi.

Oleh karena itu, masalah yang diangkat adalah: bagaimana membandingkan Sidan Umum FRETILIN 1975 dengan Parlamento Nacional sekarang dari sisi asal-usul legitimasi, komposisi, fungsi, dan metode kerja? Sejauh mana cita-cita kedaulatan rakyat yang diperjuangkan pada 1975 telah diinstitusionalisasi dalam demokrasi parlementer Timor-Leste saat ini, dan perubahan apa saja yang paling signifikan dalam perjalanan 50 tahun tersebut?

Maka rumusan masalah dalam penelitian perbandingan ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana perbedaan dan persamaan Sidan Umum FRETILIN Tahun 1975 dengan Parlamento Nacional Timor-Leste sekarang dalam aspek struktur, fungsi, legitimasi, dan metode kerja kelembagaan perwakilan politik, serta implikasinya terhadap perkembangan demokrasi Timor-Leste selama 50 tahun? Untuk membedah masalah umum di atas, penelitian ini memecahnya menjadi 5 pertanyaan khusus: Apa perbedaan sumber legitimasi antara Sidan Umum FRETILIN 1975 yang lahir dari gerakan pembebasan revolusioner tanpa pemilu, dengan Parlamento Nacional sekarang yang memperoleh legitimasi melalui pemilu universal 5 tahunan sesuai Konstitusi RDTL 2002? Sejauh mana klaim “wakil rakyat” pada 1975 berbeda dengan mandat konstitusional anggota parlemen saat ini? Bagaimana perbandingan komposisi keanggotaan antara Sidan Umum 1975 yang didominasi kader FRETILIN dan tokoh masyarakat tanpa jumlah tetap, dengan Parlamento Nacional 2026 yang terdiri 65 anggota tetap dari 5 partai politik dengan kuota 35,4% perempuan? Apa dampak perubahan komposisi ini terhadap kualitas representasi kepentingan rakyat? Apa perbedaan fungsi utama antara Sidan Umum 1975 yang merangkap fungsi legislatif-eksekutif untuk proklamasi kemerdekaan dan pembentukan Dewan Menteri, dengan Parlamento Nacional sekarang yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang terpisah dari eksekutif? Bagaimana pemisahan kekuasaan ini memengaruhi efektivitas kerja parlemen? Bagaimana metode pengambilan keputusan pada Sidan Umum 1975 yang bersifat musyawarah internal partai di tengah darurat perang, dibandingkan dengan metode kerja Parlamento Nacional sekarang yang menggunakan mekanisme komisi, sidang pleno, voting terbuka, dan transkrip publik? Sejauh mana keterbukaan dan akuntabilitas meningkat? Dalam konteks FRETILIN sebagai aktor sentral pada 1975 sekaligus partai oposisi dengan 19 kursi saat ini, apa unsur ideologi dan cita-cita kedaulatan rakyat dari Sidan Umum yang masih

bertahan dalam praktik Parlamento Nacional, dan unsur apa yang mengalami perubahan mendasar akibat transisi ke sistem demokrasi liberal?

Rumusan masalah ini menjadi panduan untuk menganalisis apakah Parlamento Nacional Timor-Leste saat ini merupakan pelembagaan langsung dari semangat Sidan Umum 1975, atau justru merupakan bentuk kelembagaan baru yang hanya memiliki kontinuitas simbolik-historis tanpa kesamaan substansi kerja politik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan Sidan Umum FRETILIN 1975 dengan Parlamento Nacional Timor-Leste sekarang dalam aspek legitimasi, komposisi keanggotaan, struktur pimpinan, fungsi pengawasan, konteks keamanan, dan hubungan dengan rakyat, serta mengidentifikasi kontinuitas dan diskontinuitas peran FRETILIN dari revolusi ke demokrasi konstitusional dan implikasinya terhadap perkembangan demokrasi Timor-Leste selama 50 tahun. Penelitian ini memperkaya khazanah ilmu ketatanegaraan dan politik perbandingan dalam kajian transformasi lembaga perwakilan dari revolusi ke demokrasi konstitusional serta mengembangkan konsep "pelembagaan kedaulatan" dalam konteks negara pascakonflik, dengan kasus Timor-Leste sebagai contoh keberhasilan menginstitutionalisasi cita-cita perjuangan ke dalam kerangka hukum modern. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi parlemen dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi kinerja kelembagaan berdasarkan pengalaman historis, menjadi bahan refleksi bagi partai politik terutama FRETILIN, serta fondasi bagi akademisi dan peneliti tentang konsolidasi demokrasi dan penguatan kelembagaan perwakilan di negara pascakonflik, sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat Timor-Leste tentang perjalanan lembaga perwakilan dan pentingnya partisipasi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian perbandingan Sidan Umum FRETILIN Tahun 1975 dengan Parlamento Nacional Timor-Leste sekarang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif-historis. Metode ini dipilih karena objek kajian bersifat institusional-politik yang berubah lintas waktu dan memerlukan penelusuran konteks sejarah, dokumen resmi, serta interpretasi makna kelembagaan. Fokusnya bukan pada kuantifikasi, melainkan pada pemahaman "bagaimana" dan "mengapa" transformasi terjadi.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan *_library research_* dengan pendekatan komparatif diakronis. Komparatif diakronis digunakan untuk membandingkan dua fenomena sejenis pada periode waktu berbeda: Sidan Umum 1975 sebagai lembaga darurat partai pembebasan, dan Parlamento Nacional 2002-2026 sebagai lembaga kedaulatan negara demokratis. Tujuannya mengidentifikasi kontinuitas, diskontinuitas, dan faktor penyebab perubahan.

Sumber Data

Data diperoleh dari dua jenis sumber:

1. Sumber Primer: Konstitusi RDTL 1975 Pasal 40 tentang Dewan Menteri, Konstitusi RDTL 2002 Seksi 92-94 tentang Parlamento Nacional, risalah Sidan Umum FRETILIN

Aileu 20 Mei 1975, dokumen IPU Parline tentang komposisi parlemen 2023-2026, dan Peraturan Tata Tertib Parlamento Nacional.

2. Sumber Sekunder: Buku sejarah Timor-Leste karya James Dunn, Sara Niner, dan John Taylor; jurnal ilmiah tentang transisi demokrasi Timor-Leste; data resmi <http://www.parlamento.tl>; serta literatur tentang gerakan pembebasan nasional.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan:

1. Dokumentasi: Mengumpulkan, mencatat, dan mengklasifikasi dokumen resmi, arsip, dan publikasi terkait Sidan Umum 1975 dan kerja Parlamento Nacional sekarang.
2. Studi Pustaka: Menelaah literatur sejarah, ilmu politik, dan hukum tata negara untuk membangun kerangka analisis komparatif kelembagaan.
3. Observasi Tidak Langsung: Menganalisis rekaman sidang, struktur komisi, dan mekanisme voting Parlamento Nacional melalui publikasi resmi untuk memahami praktik kerja saat ini.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan model Mill dan metode komparasi 4 tahap:

1. Deskripsi: Menggambarkan secara terpisah struktur, fungsi, komposisi, dan legitimasi Sidan Umum 1975 dan Parlamento Nacional 2026.
2. Interpretasi: Menafsirkan makna politik dari perbedaan konteks: darurat perang vs demokrasi konstitusional.
3. Juxtaposition: Menyandingkan kedua lembaga dalam tabel perbandingan aspek legitimasi, komposisi, fungsi, dan metode kerja.
4. Komparasi: Menarik kesimpulan tentang persamaan, perbedaan, dan implikasi transformasi terhadap kualitas demokrasi Timor-Leste. Analisis difokuskan pada kerangka teori kelembagaan politik David Easton tentang input-output sistem politik.

Validitas Data

Validitas dicapai melalui triangulasi sumber: membandingkan data dari dokumen FRETILIN, konstitusi, dan catatan sejarawan independen. Reliabilitas dijaga dengan mengutip sumber primer resmi dan data IPU yang terverifikasi.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan secara sistematis bagaimana cita-cita perwakilan rakyat pada Sidan Umum 1975 bertransformasi menjadi praktik parlementer modern di Timor-Leste, tanpa mengabaikan konteks sejarah dan politik masing-masing periode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis perbandingan Sidan Umum FRETILIN 1975 dengan Parlamento Nacional Timor-Leste sekarang dilakukan melalui 4 aspek kelembagaan: legitimasi, komposisi, fungsi, dan metode kerja. Kerangka analisis menggunakan teori sistem politik David Easton: *_input_* berupa tuntutan rakyat, *_process_* berupa pengambilan keputusan, dan *_output_* berupa kebijakan.

Aspek Legitimasi dan Sumber Kedaulatan;

Sidan Umum 1975 memperoleh legitimasi revolusioner. Legitimasi lahir dari klaim moral FRETILIN sebagai “*vanguardia do povo*” yang memimpin perlawanan terhadap

kolonialisme Portugal dan UDT. Tidak ada pemilu, tidak ada pengakuan internasional. Kedaulatan ditegakkan lewat proklamasi 28 November 1975. Ini legitimasi *_de facto_* yang rapuh, sehingga runtuh 17 hari kemudian akibat invasi Indonesia.

Parlamento Nacional 2026 memperoleh legitimasi konstitusional-legal. Pasal 92 Konstitusi RDTL 2002 menyatakan parlemen adalah “*órgão de soberania*” yang mewakili seluruh rakyat Timor-Leste. Legitimasi diperkuat pemilu 21 Mei 2023 dengan partisipasi tinggi dan pengakuan PBB, CPLP, ASEAN. Dari legitimasi perjuangan ke legitimasi hukum. Ini menunjukkan konsolidasi kedaulatan: kedaulatan rakyat 1975 yang masih abstrak kini diinstitusionalisasi lewat prosedur pemilu.

Aspek Komposisi dan Representasi

Sidan Umum 1975 bersifat tertutup dan homogen. Pesertanya kader inti FRETILIN, komandan regional, dan tokoh simpatisan. Tidak ada mekanisme kuota, tidak ada oposisi formal karena UDT sudah dikalahkan Agustus 1975. Representasi bersifat “virtual”: kader mengklaim bicara atas nama rakyat desa tanpa proses pemilihan.

Parlamento Nacional 2026 bersifat terbuka dan pluralistik. 65 anggota dari 5 partai: CNRT 31, FRETILIN 19, PD 6, KHUNTO 5, PLP 4. Ada 23 perempuan = 35,4%, dengan Presiden Parlemen perempuan Maria Fernanda Lay. Setiap 21.292 warga diwakili 1 anggota. Perubahan ini mencerminkan transisi dari demokrasi “partai tunggal pembebasan” ke demokrasi multipartai kompetitif. FRETILIN tetap hadir dengan 19 kursi, tapi statusnya berubah: dari penguasa tunggal 1975 menjadi oposisi 2023. Ini bukti sirkulasi elit politik berjalan.

Aspek Fungsi dan Pemisahan Kekuasaan

Sidan Umum 1975 merangkap fungsi. Dalam 2 minggu sidang, forum ini sekaligus: 1) Legislatif = menyusun Konstitusi RDTL 1975, 2) Eksekutif = melantik Presiden dan PM, 3) Konstituante = menyatakan kemerdekaan. Tidak ada pemisahan kekuasaan karena situasi darurat perang. Dewan Menteri 1 Desember 1975 langsung merangkap fungsi parlemen.

Parlamento Nacional 2026 menjalankan fungsi trias politika murni legislatif. Wewenang: membuat UU, mengawasi Pemerintah, menyetujui APBN. Fungsi eksekutif dipegang Pemerintah CNRT-PD, yudikatif dipegang pengadilan. Ada 9 komisi permanen seperti Komisi Keuangan dan Komisi Kesetaraan Gender. Pemisahan ini meningkatkan *_check and balance_*, tapi juga membuat proses legislasi lebih lambat dibanding keputusan cepat Sidan Umum 1975.

Aspek Metode Kerja dan Akuntabilitas

Sidan Umum 1975 menggunakan metode komando-mobilisasi. Keputusan diambil lewat musyawarah kader pusat di Aileu, lalu dieksekusi lewat struktur gerilya ke desa. Tidak ada transkrip publik, tidak ada voting formal, dan sidang dihentikan paksa invasi 7 Desember 1975. Akuntabilitas bersifat internal partai.

Parlamento Nacional 2026 menggunakan metode prosedural-demokratis. Sidang pleno disiarkan, risalah dipublikasi di <http://www.parlamento.tl>, voting pakai sistem elektronik. Anggota dipilih 5 tahunan bisa dievaluasi pemilih. Ada mekanisme interpelasi, hak angket, dan petisi rakyat. Akuntabilitas publik lebih tinggi, tapi birokrasi lebih kompleks.

Kesimpulan Analisis Sementara; Transformasi dari Sidan Umum ke Parlamento Nacional adalah transformasi dari “parlemen perang” ke “parlemen damai”. Kontinuitas: semangat kedaulatan rakyat dan peran sentral FRETILIN. Diskontinuitas: dari sentralistik ke pluralistik, dari darurat ke rutin, dari legitimasi revolusi ke legitimasi konstitusi. Ini menunjukkan Timor-Leste berhasil melembagakan cita-cita 1975 ke dalam kerangka demokrasi modern, meski tantangannya kini bergeser dari bertahan hidup menjadi memperkuat kualitas representasi.

1. Komposisi dan Jumlah:

Aspek komposisi dan jumlah anggota merupakan indikator paling nyata perbedaan Sidan Umum FRETILIN 1975 dengan Parlamento Nacional Timor-Leste sekarang. Perbedaan ini mencerminkan perubahan dari lembaga partai pembebasan darurat menjadi lembaga kedaulatan negara demokratis.

a. Umum Sidan FRETILIN 1975: Komposisi Tertutup dan Jumlah Fleksibel;

Sidan Umum yang diselenggarakan 20 Mei 1975 di Aileu tidak memiliki jumlah anggota tetap seperti parlemen modern. Pesertanya terdiri dari 3 kelompok utama:

- 1) Kader Inti FRETILIN: Anggota Komite Sentral dan pimpinan regional FRETILIN yang menjadi pengambil keputusan utama. Jumlahnya terbatas, hanya puluhan orang, karena sidang dilakukan di tengah perang saudara melawan UDT.
- 2) Komandan dan Komisar Politik Regional: Perwakilan dari distrik-distrik yang menguasai wilayah pasca kemenangan FRETILIN Agustus 1975. Mereka mewakili struktur gerilya, bukan daerah pemilihan.
- 3) Tokoh Masyarakat Simpatisan: Sejumlah tokoh adat, guru, dan aktivis yang mendukung FRETILIN. Kehadiran mereka bersifat undangan, bukan hasil pemilihan.

Ciri utama komposisi 1975: 1) Homogen ideologis, 100% kader dan simpatisan FRETILIN karena UDT sudah dikalahkan dan APODETI minim pengaruh; 2) Tidak ada kuota gender formal, peran perempuan penting di Brigada Revolucionária tapi minim di pimpinan pusat; 3) Jumlah tidak diatur konstitusi karena Konstitusi RDTL 1975 baru dibacakan 28 November 1975 setelah Sidan Umum. Fokusnya kualitas mobilisasi, bukan kuantitas keterwakilan. Output komposisinya adalah Dewan Menteri kecil: Presiden Francisco Xavier do Amaral, PM Nicolau Lobato, dan beberapa menteri merangkap fungsi.

b. Parlamento Nacional 2026: Komposisi Terbuka dan Jumlah Tetap Konstitusional;

Parlamento Nacional ke-6 periode 2023-2028 memiliki komposisi dan jumlah yang rigid berdasarkan Konstitusi RDTL 2002 Seksi 93:

- 1) Jumlah Tetap 65 Anggota: Minimum 52 dan maksimum 65 anggota. Jumlah 65 ditetapkan UU Pemilu. Masa jabatan 5 tahun, pemilu terakhir 21 Mei 2023, pemilu berikut 2028. Rasio keterwakilan: 1 anggota untuk 21.292 warga.
- 2) Komposisi Multipartai: Tidak ada satu partai dominan. Hasil pemilu 2023: CNRT 31 kursi sebagai partai pemerintah, FRETILIN 19 kursi sebagai oposisi utama, PD 6, KHUNTO 5, PLP 4. FRETILIN yang menguasai Sidan Umum 1975 kini hanya 29,2% kursi dan berstatus oposisi. Ini menunjukkan sirkulasi kekuasaan dan kompetisi demokratis.

- 3) Komposisi Gender: 23 perempuan dari 65 anggota = 35,4%. Ini tertinggi di Asia Tenggara. Presiden Parlemen Maria Fernanda Lay perempuan. UU mewajibkan 1 dari 3 kandidat daftar partai adalah perempuan. Ada Komisi Kesetaraan Gender yang diketuai Maria Gorumali Barreto.
- 4) Komposisi Usia dan Latar Belakang: Usia anggota 31-80 tahun. Mayoritas 46-60 tahun: 21 orang. Anggota termuda 31-40 tahun hanya 2 orang. Latar belakang beragam: mantan gerilyawan, akademisi, aktivis LSM, pengusaha. Lebih heterogen dibanding kader tunggal 1975.

c. Perbandingan Singkat Komposisi-Jumlah

Tabel 1. Perbandingan Komposisi dan Jumlah Anggota

Aspek	Sidan Umum 1975	Parlamento Nacional 2026
Jumlah Anggota	Tidak tetap, puluhan kader	Tetap 65 anggota konstitusional
Cara Masuk	Penunjukan/undangan partai	Pemilu proporsional D'Hondt
Pluralisme Partai	1 Partai: FRETILIN dominan	5 partai, FRETILIN oposisi 19 kursi
Representasi Perempuan	Tidak ada kuota, minim pimpinan	23 orang = 35,4%, ada kuota
Basis Representasi	Mobilisasi revolusioner	Daerah pemilihan nasional

Sumber: Diolah dari berbagai sumber primer dan sekunder (Konstitusi RDTL 1975; Konstitusi RDTL 2002; CAVR, 2005; Dunn, 1996; STAE & CNE, 2023; IPU Parline, 2024).

Kesimpulan: Dari sisi jumlah, Sidan Umum 1975 fleksibel karena darurat, sementara Parlamento Nacional 2026 tetap karena kepastian hukum. Dari sisi komposisi, terjadi demokratisasi besar: dari homogen-FRETILIN ke plural-multipartai, dari minim perempuan ke 35,4% perempuan. Namun benang merahnya tetap ada: FRETILIN sebagai aktor 1975 masih menjadi 1 dari 5 kekuatan utama parlemen 2026, membuktikan kontinuitas politik meski format kelembagaan berubah total.

2. Metode Pemilihan

Metode pemilihan merupakan perbedaan paling mendasar antara Sidan Umum dan Parlamento Nacional. Perbedaan ini mencerminkan transisi dari sistem rekrutmen internal ke sistem demokrasi elektoral.

a. METODE PEMILIHAN SIDAN UMUM 1975: REKRUTMEN INTERNAL

Sidan Umum Agustus 1975 tidak dipilih oleh rakyat Timor-Leste melalui pemilu. Metode yang digunakan adalah (rekrutmen internal dan kooptasi politik):

- 1) Prinsip Dasar: Delegasi Partai, Bukan Pemilu Rakyat;
Peserta Sidan Umum adalah delegasi dari struktur FRETILIN. Mereka ditunjuk berdasarkan posisi dalam hierarki partai: anggota Komite Sentral, sekretaris regional, komandan gerilya, dan kader senior. Rakyat tidak memilih langsung. Prinsipnya “partai mewakili rakyat” karena situasi darurat perang melawan kolonialisme Portugal dan invasi Indonesia yang sudah mengancam perbatasan.
- 2) Mekanisme: Musyawarah dan Penunjukan;
Tidak ada TPS, tidak ada daftar pemilih, tidak ada kampanye. Calon pimpinan Sidan Umum seperti Nicolau Lobato dan Mari Alkatiri muncul melalui musyawarah internal Komite Sentral FRETILIN. Keputusan diambil lewat

konsensus kader, bukan voting mayoritas. Metode ini efisien untuk kondisi perang gerilya.

3) Konteks Pembatas: Darurat dan Ketidaktersediaan Pemilu;

Pemilu tidak mungkin dilakukan tahun 1975 karena 3 faktor: 1) Portugal meninggalkan Timor tanpa menyelenggarakan pemilu dekolonisasi yang dijanjikan; 2) Perang saudara FRETILIN vs UDT Agustus 1975 membuat infrastruktur hancur; 3) Ancaman invasi Indonesia 7 Desember 1975 membuat waktu sangat sempit. Jadi Sidan Umum lahir dari “necessidade histórica”, bukan dari prosedur demokratis.

4) Legitimasi: Klaim Representasi Ideologis;

Legitimasi metode ini bersandar pada klaim FRETILIN sebagai “partai paling revolusioner dan berakar pada massa”. Anggota dianggap sah karena dinilai paling berjuang, bukan karena dipilih. Metode ini wajar untuk fase revolusi, tapi tidak bisa dipertahankan untuk negara konstitusional.

b. METODE PEMILIHAN PARLAMENTO NACIONAL: DEMOKRASI ELEKTORAL

Parlamento Nacional dipilih melalui (Sistem Proporsional Daftar Tertutup) sesuai UU No. 7/2006 tentang Pemilu Anggota Parlemen yang terakhir diubah UU No. 10/2023.

1) Prinsip Dasar: Kedaulatan Rakyat Langsung

Pasal 4 UU Pemilu: “Kekuasaan negara dilaksanakan oleh rakyat melalui perwakilan”. Setiap warga Timor-Leste usia 17+ tahun berhak 1 suara. Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Pemilu terakhir 21 Mei 2023 diikuti 12 partai, 3 lolos parliamentary threshold 4%.

2) Mekanisme: Daftar Tertutup + Proporsional

- a) Dapil Nasional Tunggal: Timor-Leste = 1 dapil untuk 65 kursi. Tidak ada dapil daerah.
- b) Daftar Tertutup: Pemilih mencoblos partai, bukan calon. Urutan calon ditentukan partai. Ini berbeda dengan Sidan Umum yang urutannya ditentukan kader.
- c) Metode Sainte-Laguë: Suara partai dibagi 1, 3, 5, 7 dst untuk alokasi kursi. Lebih proporsional dari Sidan Umum yang 100% kursinya ke FRETILIN.
- d) Parliamentary Threshold 4%: Partai harus dapat 4% suara nasional baru dapat kursi. Pemilu 2023: FRETILIN dapat 25,75% = 19 kursi.
- e) Kuota Perempuan 33%: UU mewajibkan minimal 1 perempuan di setiap 3 urutan daftar. Ini membuat keterwakilan perempuan 35,4%, berbeda jauh dari Sidan Umum yang tanpa kuota.

3) Siklus dan Akuntabilitas: 5 Tahun Sekali

Anggota menjabat 5 tahun. Pemilu rutin: 2001, 2007, 2012, 2017, 2018, 2023. Rakyat bisa “mengganti” anggota lewat pemilu. Ini berbeda dari Sidan Umum yang anggotanya tidak bisa diganti rakyat karena tidak dipilih.

4) Lembaga Pelaksana: CNE dan STAE

Metode ini dijalankan Komisi Pemilihan Umum CNE dan Sekretariat Teknis STAE. Ada pengawasan independen. Sidan Umum 1975 tidak punya lembaga independen karena FRETILIN = penyelenggara + peserta.

c. PERBANDINGAN SINGKAT METODE PEMILIHAN

Tabel 2. Perbandingan Metode Pemilihan

Aspek	Sidan Umum 1975	Parlamento Nacional 2026
Prinsip	Delegasi Partai	Kedaulatan Rakyat Langsung
Mekanisme	Penunjukan & Musyawarah Kader	Pemilu Proporsional Daftar Tertutup
Pemilih	Tidak ada, hanya kader FRETILIN	860.000+ pemilih terdaftar
Siklus	Sekali, darurat 1975	5 tahun sekali, rutin
Kuota Perempuan	Tidak ada	Wajib 33% dalam daftar
Tujuan	Mobilisasi Perang Kemerdekaan	Representasi Negara Konstitusional

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Dunn, 1996; Nicol, 2002; CAVR, 2005; Hicks, 2015; Konstitusi RDTL 2002; UU Pemilu 2023; STAE & CNE, 2023).

Kesimpulan: Metode Sidan Umum 1975 adalah metode “revolusioner” yang sah untuk fase pembebasan, tapi tidak demokratis. Metode Parlamento Nacional 2026 adalah metode “konstitusional” yang demokratis tapi membutuhkan biaya dan waktu besar. Transisi metode ini menandai keberhasilan Timor-Leste mengubah cara memilih pemimpin: dari ditunjuk kader menjadi dipilih rakyat.

3. Legitimasi

Legitimasi adalah “hak untuk memerintah” yang diterima rakyat. Perbandingan legitimasi Sidan Umum FRETILIN 1975 dan Parlamento Nacional 2026 menunjukkan pergeseran dari legitimasi revolusioner ke legitimasi konstitusional-demokratis.

a. LEGITIMASI SIDAN UMUM FRETILIN 1975: LEGITIMASI REVOLUSIONER

Sidan Umum 20 Mei 1975 di Aileu tidak lahir dari pemilu, tetapi dari situasi krisis dekolonisasi. Sumber legitimasinya bersifat 3 lapis:

1) Legitimasi Sejarah-Perjuangan

FRETILIN mengklaim legitimasi karena menjadi “vanguarda do povo” yang paling konsisten melawan kolonialisme Portugal sejak 1974. Setelah mengalahkan UDT dalam perang saudara Agustus 1975, FRETILIN menguasai 95% wilayah Timor. Kemenangan militer ini dianggap “bukti mandat rakyat” meski tanpa pencoblosan. Rakyat desa mendukung karena FRETILIN memberi program literasi, kesehatan, dan pertahanan diri.

2) Legitimasi Proklamasi Sepihak

Puncak legitimasi Sidan Umum adalah Proklamasi Kemerdekaan 28 November 1975. Melalui Konstitusi RDTL 1975 Pasal 40, Sidan Umum melantik Presiden Francisco Xavier do Amaral dan PM Nicolau Lobato. Legitimasi ini bersifat *de facto*: diakui oleh FRETILIN dan sebagian rakyat, tapi ditolak Portugal, Indonesia, dan PBB. Portugal menganggap FRETILIN “pemberontak”, Indonesia menganggap “tidak sah”.

3) Keterbatasan Legitimasi

Kelemahan utama: 1) Tidak ada prosedur pemilu, sehingga oposisi UDT/APODETI tidak terwakili; 2) Tidak ada pengakuan internasional, RDTL 1975 hanya diakui 12 negara; 3) Umur pendek, dibubarkan invasi 7 Desember

1975. Jadi legitimasi Sidan Umum kuat secara moral-perjuangan, tapi lemah secara hukum-formal.

b. LEGITIMASI PARLAMENTO NACIONAL 2026: LEGITIMASI KONSTITUSIONAL-DEMOKRATIS

Parlamento Nacional ke-6 periode 2023-2028 memiliki sumber legitimasi yang berbeda total, diatur Konstitusi RDTL 2002 Seksi 92-94:

1) Legitimasi Konstitusional

Parlemen disebut “*órgão de soberania*” yang mewakili seluruh rakyat Timor-Leste. Keberadaannya bukan pilihan politik, tapi perintah konstitusi. Setiap UU, anggaran, dan pengawasan pemerintah harus lewat parlemen. Ini memberi legitimasi hukum yang kokoh dan tidak tergantung siapa yang berkuasa.

2) Legitimasi Elektoral

Anggota 65 orang dipilih 21 Mei 2023 lewat pemilu proporsional daftar tertutup. Partisipasi pemilih 78,7%. Pemilu diawasi CNE-STAE, pengamat domestik dan internasional. Hasilnya diakui CNRT, FRETILIN, PD, KHUNTO, PLP tanpa sengketa besar. Pemilu rutin 5 tahun sekali membuat legitimasi diperbarui terus. FRETILIN dapat 19 kursi bukan karena warisan 1975, tapi karena 214.865 rakyat mencoblosnya.

3) Legitimasi Internasional

Parlamento Nacional diakui PBB, CPLP, ASEAN, IPU, dan 150+ negara. Presiden Parlemen Maria Fernanda Lay diundang ke forum parlemen dunia. Pengakuan ini memberi “legitimasi eksternal” yang tidak dimiliki Sidan Umum 1975. RDTL 2002 sekarang diakui penuh, berbeda dengan RDTL 1975 yang hanya 17 hari.

4) Legitimasi Kinerja

Selain dipilih, legitimasi parlemen sekarang juga diuji lewat kinerja: mengesahkan UU, menyetujui APBN, mengawasi pemerintah lewat interpelasi dan komisi. Ada 23 anggota perempuan = 35,4%, ini menambah legitimasi inklusif yang tidak ada di 1975.

c. PERBANDINGAN SINGKAT SUMBER LEGITIMASI

Tabel 3. Perbandingan Sumber Legitimasi

Aspek	Sidan Umum 197	5 Parlamento Nacional 2026
Sumber Utama	Perjuangan & Proklamasi	Konstitusi 2002 + Pemilu 2023
Dasar Hukum	Konstitusi RDTL 1975 Pasal 40	Konstitusi RDTL 2002 Seksi 92
Pengakuan Rakyat	Klaim moral “wakil rakyat tertindas”	Mandat 860.000+ pemilih
Pengakuan Internasional	12 negara, ditolak PBB	Diakui PBB, CPLP, ASEAN, dunia
Sifat	De facto, darurat, rapuh	De jure, rutin, stabil
Uji Legitimasi	Invasi 7 Desember 1975	Pemilu 5 tahun sekali

Sumber: Diolah dari Proklamasi RDTL 1975, Konstitusi RDTL 1975 dan 2002, CAVR (2005), Dunn (1996), Nicol (2002), STAE & CNE (2023), IPU Parline (2024).

Kesimpulan: Sidan Umum 1975 memiliki legitimasi “darah dan perjuangan” yang heroik tapi rapuh karena tanpa prosedur. Parlamento Nacional 2026 memiliki legitimasi “suara dan hukum” yang prosedural dan stabil karena diperkuat konstitusi dan pemilu.

Transisi ini membuktikan Timor-Leste berhasil mengubah legitimasi dari “kami berjuang untukmu” menjadi “kamu memilih kami”. Cita-cita kedaulatan rakyat 1975 akhirnya diinstitusionalisasi lewat kotak suara, bukan senjata. Sidan Umum klaim legitimasi revolusioner: “suara rakyat melawan kolonial” tapi tidak diakui Portugal/Indonesia. Parlamento Nacional punya legitimasi konstitusional dan internasional, anggota IPU sejak 2008. Dari legitimasi perjuangan ke legitimasi hukum.

4. Struktur Pimpinan

Struktur pimpinan adalah kerangka jabatan yang mengatur siapa memimpin sidang dan lembaga. Perbandingan struktur Sidan Umum 1975 dan Parlamento Nacional 2026 menunjukkan transisi dari kepemimpinan sentralistik partai ke kepemimpinan kolektif konstitusional.

a. STRUKTUR PIMPINAN SIDAN UMUM 1975: SENTRALISTIK-PARTAI

Sidan Umum FRETILIN 20 Mei 1975 tidak punya struktur pimpinan parlemen modern karena sifatnya sidang partai, bukan lembaga negara. Struktur pimpinannya melebur dengan struktur partai:

1) Pimpinan Sidang: Komite Sentral FRETILIN

Sidang dipimpin kolektif oleh Komite Sentral FRETILIN. Tokoh sentralnya Francisco Xavier do Amaral sebagai Koordinator Politik Nasional dan Nicolau Lobato sebagai Wakil Koordinator. Tidak ada jabatan “Ketua Sidan Umum” formal seperti Ketua DPR sekarang. Fungsi pimpinan sidang dijalankan siapa yang paling senior dan berwibawa saat itu. Keputusan diambil lewat musyawarah kader inti.

2) Output Pimpinan: Dewan Menteri 1 Desember 1975

Hasil terpenting Sidan Umum adalah pembentukan Dewan Menteri RDTL. Struktur pimpinannya:

- a) Presiden: Francisco Xavier do Amaral;
- b) Perdana Menteri: Nicolau Lobato;
- c) Menteri-menteri: Merangkap fungsi legislatif dan eksekutif. Misalnya Mari Alkatiri Menteri Luar Negeri.

Ciri: 1) Tidak ada pemisahan antara pimpinan partai, pimpinan sidang, dan pimpinan negara. 1 orang bisa merangkap 3 jabatan. 2) Jumlah pimpinan sangat sedikit karena darurat perang. 3) Tidak ada wakil ketua, sekretaris, atau bendahara seperti parlemen modern.

3) Sifat Kepemimpinan

Kepemimpinan bersifat komando, vertikal, dan tertutup. Hanya kader FRETILIN yang bisa jadi pimpinan. Tidak ada mekanisme pemilihan pimpinan lewat voting anggota karena anggota Sidan Umum sendiri ditunjuk.

b. STRUKTUR PIMPINAN PARLAMENTO NACIONAL 2026: KOLEKTIF-KONSTITUSIONAL

Parlamento Nacional punya struktur pimpinan resmi diatur Konstitusi RDTL 2002 Seksi 95 dan Peraturan Tata Tertib. Ini “Meja Pimpinan” Mesa do Parlamento:

- 1) Pimpinan Tertinggi: Presiden Parlemen;
- 2) Jabatan tertinggi dipegang (Maria Fernanda Lay) dari CNRT sejak 22 Juni 2023. Tugas: memimpin sidang pleno, mewakili parlemen ke luar negeri,

menandatangani UU. Ini setara “Ketua DPR RI”. Berbeda dengan 1975, Presiden Parlemen 2026 tidak merangkap Presiden Negara. Pemisahan kekuasaan jelas.

3) Struktur Meja Pimpinan 5 Orang;

- a) Presidente: Maria Fernanda Lay – CNRT;
- b) Vice-Presidente 1: Lidia Norberta dos Santos Martins – FRETILIN;
- c) Vice-Presidente 2: Maria Terezinha Viegas – CNRT;
- d) Secretário: Alexandrino Cardoso – FRETILIN;
- e) Secretária Adjunta: Maria Fernanda Lay – CNRT.

Ciri: 1) Kolektif, ada 2 wakil untuk cek dan imbang. 2) Proporsional partai: CNRT 3 kursi, FRETILIN 2 kursi sesuai hasil pemilu. 3) Ada 2 perempuan di 4 pimpinan = 50%, jauh lebih inklusif dari 1975. 4) Dipilih lewat voting anggota parlemen setiap awal periode.

4) Struktur Lanjutan: Ketua Komisi;

Di bawah Meja Pimpinan ada 9 Komisi Permanen. Setiap komisi punya 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 1 Sekretaris. Contoh: Komisi A dipimpin João Gonçalves. Total pimpinan parlemen 30 orang, jauh lebih besar dan terdiferensiasi dibanding Dewan Menteri kecil 1975.

c. PERBANDINGAN SINGKAT STRUKTUR PIMPINAN

Tabel 4. Perbandingan Struktur Pimpinan

Aspek	Sidan Umum 1975	Parlamento Nacional 2026
	Tidak ada, melebur ke Komite Sentral fretilin	Mesa do Parlamento Nacional
Nama Lembaga		
Jabatan Tertinggi	Koordinator Politik: F.X. do Amaral	PPN: Maria Fernanda Lay
Jumlah Pimpinan	2-3 orang inti, merangkap jabatan	5 orang Meja + 27 Ketua/Wakil Komisi
Cara Pilih	Musyawarah & Penunjukan Kader	Voting anggota parlemen
Pemisahan Fungsi	Tidak ada, partai=negara=sidang	Ada, parlemen terpisah dari eksekutif
Inklusivitas	Minim, semua laki-laki	2 dari 5 Meja = perempuan
Gender		

Sumber: Diolah dari Resolusi Sidan Umum Aileu 1975, Dunn (1996), Nicol (2002), CAVR (2005), Hicks (2015), Konstitusi RDTL 2002, Regimento Parlamento Nacional 2017, Parlamento Nacional (2023)

Kesimpulan: Struktur pimpinan Sidan Umum 1975 sederhana, sentralistik, dan darurat karena tujuannya memproklamasikan kemerdekaan cepat. Struktur pimpinan Parlamento Nacional 2026 kompleks, kolektif, dan prosedural karena tujuannya mengelola negara demokratis jangka panjang. Dari pimpinan “1 komandan” 1975 ke pimpinan “1 tim 5 orang” 2026. Namun benang merahnya: FRETILIN tetap punya kursi Wakil Ketua 1 dan Sekretaris 2026, membuktikan warisan politik 1975 masih hidup meski format kepemimpinannya berubah total.

5. Peran Perempuan

Peran perempuan adalah indikator kemajuan demokrasi dan inklusi politik. Perbandingan Sidan Umum FRETILIN 1975 dengan Parlamento Nacional 2026 menunjukkan lompatan besar dari peran “pejuang di belakang layar” ke “pengambil keputusan di meja pimpinan”.

a. PERAN PEREMPUAN PADA SIDAN UMUM 1975: PEJUANG REVOLUSI, MINIM PIMPINAN

Sidan Umum 20 Mei 1975 berlangsung di tengah perang. Peran perempuan penting secara mobilisasi, tapi sangat terbatas secara struktural:

1) Peran di Lapangan: OMT dan Gerilya;

Perempuan diorganisasi lewat Organização da Mulher Timorese - OMT, sayap perempuan FRETILIN. Peran utama: 1) Literasi dan kesehatan di desa, 2) Logistik dan makanan untuk gerilyawan, 3) Pengintai dan kurir rahasia, 4) Sebagian kecil ikut bertempur sebagai anggota FALINTIL. Nama penting: Rosa "Muki" Bonaparte, Maria do Céu Lopes da Silva. Kontribusi mereka vital untuk kelangsungan perang.

2) Peran di Struktur Pimpinan: Hampir Tidak Ada;

Di Sidan Umum Aileu dan Dewan Menteri 1 Desember 1975, tidak ada perempuan yang duduk sebagai anggota Komite Sentral, Menteri, atau pimpinan sidang. Pimpinan 100% laki-laki: Francisco Xavier do Amaral, Nicolau Lobato, Mari Alkatiri. Tidak ada kuota, tidak ada agenda kesetaraan gender formal. Fokus FRETILIN 1975 adalah kemerdekaan nasional, isu gender dianggap "sekunder".

3) Keterbatasan Struktural;

Penyebab minimnya perempuan di pimpinan: 1) Kultur patriarkal Timor yang masih kuat tahun 1975; 2) Kondisi perang membuat ruang publik didominasi laki-laki bersenjata; 3) Pendidikan formal perempuan masih rendah. Jadi peran perempuan 1975 bersifat "revolusioner tapi tidak terinstitusionalisasi".

b. PERAN PEREMPUAN DI PARLAMENTO NACIONAL 2026: PEMIMPIN KONSTITUSIONAL

Parlamento Nacional ke-6 2023-2028 adalah salah satu parlemen paling inklusif gender di Asia. Peran perempuan sudah terlembaga:

1) Jumlah dan Keterwakilan: Tertinggi di Kawasan;

Dari 65 anggota, (23 orang perempuan = 35,4%). Ini melampaui rata-rata global 26,9% dan ASEAN 20,6%. Angka ini hasil UU Pemilu yang mewajibkan 1 perempuan di setiap 3 urutan daftar partai. Partai FRETILIN sendiri punya 7 anggota perempuan dari 19 kursi = 36,8%.

2) Peran di Pimpinan Tertinggi;

a) Presidente do Parlamento: Maria Fernanda Lay - CNRT. Perempuan pertama dan satu-satunya yang memimpin parlemen Timor-Leste sepanjang sejarah. Tugasnya setara Ketua DPR RI.

b) Vice-Presidente 1: Lidia Norberta dos Santos Martins - FRETILIN.

c) Ketua Komisi Penting: Komisi Kesetaraan Gender dipimpin Maria Gorumali Barreto. Komisi Pendidikan dipimpin Nurima Ribeiro Alkatiri. Dari 5 pimpinan Meja, 2 perempuan = 40%. Ini mustahil dibayangkan pada struktur Sidan Umum 1975.

3) Peran Legislasi: Agenda Gender Terlembaga;

Perempuan anggota parlemen aktif mendorong UU anti kekerasan domestik, UU cuti melahirkan, dan anggaran responsif gender. Ada Kamar Perempuan Anggota

Parlemen yang lintas partai. Mereka tidak lagi “mendukung dari belakang”, tapi “menulis UU dari depan”.

4) Faktor Pendorong;

Perubahan ini didukung: 1) Konstitusi 2002 Seksi 17 tentang kesetaraan gender; 2) Kuota 33% UU Pemilu; 3) Peran OMT-FRETILIN yang terus mendidik kader perempuan sejak 1975; 4) Pengaruh organisasi perempuan pasca-kemerdekaan 2002.

c. PERBANDINGAN SINGKAT PERAN PEREMPUAN

Tabel 5. Perbandingan Peran Perempuan

Aspek	Sidan Umum 1975	Parlamento Nacional 2026
Jumlah Perempuan	0 di pimpinan inti	23 dari 65 anggota = 35,4%
Jabatan Tertinggi	Tidak ada Presidente do Parlamento	Maria Fernanda Lay
Dasar Hukum	Tidak ada	Konstitusi 2002 + Kuota 33% UU Pemilu
Peran Utama	Mobilisasi, logistik, gerilya OMT	Pembuat UU, pimpinan sidang, Ketua Komisi
Institusionalisasi	Tidak terlembaga	Komisi Kesetaraan Gender + Kamar Perempuan

Sumber: Diolah dari CAVR (2005), Hicks (2015), Konstitusi RDTL 2002, UU Pemilu No. 7/2023, UNDP (2024), IPU Parline (2024), Parlamento Nacional (2023).

Kesimpulan: Dari 1975 ke 2026 terjadi transformasi “dari dapur ke parlemen”. Perempuan 1975 berkorban darah dan tenaga untuk kemerdekaan tapi suaranya minim di meja keputusan. Perempuan 2026 mewarisi semangat OMT itu dan menerjemahkannya jadi kekuasaan konstitusional: memimpin sidang, memimpin partai, menulis UU. Cita-cita Sidan Umum 1975 tentang “Timor-Leste merdeka untuk semua rakyat” kini diwujudkan Parlamento Nacional 2026 lewat keterwakilan perempuan 35,4%.

6. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah kewenangan lembaga perwakilan untuk mengontrol pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Perbandingan Sidan Umum 1975 dengan Parlamento Nacional 2026 menunjukkan perubahan dari “pengawasan revolusioner” ke “pengawasan konstitusional prosedural”.

a. FUNGSI PENGAWASAN SIDAN UMUM 1975: PENGAWASAN INTERNAL DAN REVOLUSIONER.

Sidan Umum Agustus-Desember 1975 tidak punya fungsi pengawasan seperti parlemen modern karena 3 alasan: darurat perang, merangkap kekuasaan, dan umur pendek.

1) Mekanisme: Kontrol Politik Internal FRETILIN;

Sidang Umum sekaligus Komite Sentral FRETILIN. Jadi fungsi “mengawasi” dilakukan lewat disiplin partai, bukan lewat sidang dengar pendapat. Pimpinan seperti Nicolau Lobato mengawasi menteri-menteri karena mereka semua kader FRETILIN. Jika ada pejabat melanggar, sanksinya teguran partai atau pencopotan internal. Tidak ada hak interpelasi, tidak ada hak angket.

2) Objek Pengawasan: Efisiensi Perang;

Yang diawasi bukan kebijakan fiskal atau HAM, tapi: 1) Distribusi logistik ke front gerilya, 2) Loyalitas kader terhadap garis FRETILIN, 3) Kesiapan pertahanan menghadapi invasi Indonesia. Pengawasan bersifat vertikal: pusat Aileu mengawasi daerah. Rakyat tidak bisa memanggil menteri untuk dimintai keterangan.

3) Keterbatasan Fundamental;

- a) Tidak ada pemisahan kekuasaan: Anggota Sidan Umum yang melantik Dewan Menteri 1 Desember 1975 adalah orang yang sama yang jadi menteri. Mustahil mengawasi diri sendiri.
 - b) Tidak ada waktu: RDTL 1975 hanya bertahan 17 hari sebelum invasi 7 Desember 1975. Belum sempat membentuk komisi pengawasan.
 - c) Tidak ada transparansi: Sidang tertutup, tidak ada risalah publik, media independen dibredel. Jadi pengawasan ke publik tidak ada.
- Singkatnya, pengawasan 1975 bersifat “kepercayaan antar kawan seperjuangan”, bukan “check and balance lembaga”.

b. FUNGSI PENGAWASAN PARLAMENTO NACIONAL 2026: PENGAWASAN KONSTITUSIONAL BERLEMBAGA

Parlamento Nacional punya fungsi pengawasan yang kuat diatur Konstitusi RDTL 2002 Seksi 97 dan Peraturan Tata Tertib. Ini “paru-paru demokrasi”.

1) Instrumen Konstitusional;

Anggota 65 orang punya 5 alat pengawasan utama:

- a) Interpelasi: Memanggil PM atau Menteri untuk menjelaskan kebijakan di sidang pleno. Contoh: interpelasi Menteri Keuangan soal APBN.
- b) Hak Angket: Membentuk komisi khusus untuk menyelidiki kasus besar. Komisi Angket bisa memanggil saksi dan meminta dokumen.
- c) Pertanyaan: Anggota wajib jawab lisan/tertulis dari Menteri dalam 30 hari.
- d) Komisi Permanen 9 Bidang: Komisi C bidang Keuangan dan Komisi D bidang Ekonomi rutin memanggil pemerintah. Setiap komisi punya kuasa memanggil pejabat.
- e) Menolak/Setujui APBN: Senjata paling kuat. Tanpa persetujuan 65 anggota, pemerintah tidak bisa belanja negara. APBN 2024 disetujui setelah debat panjang dan revisi.

2) Objek Pengawasan: Kebijakan dan Anggaran;

Yang diawasi: pelaksanaan UU, penggunaan anggaran negara, tindakan pemerintah, perjanjian internasional. Contoh nyata: Parlemen menolak beberapa pasal APBN 2023 dan meminta transparansi dana Petroleum Fund. FRETILIN yang jadi oposisi 19 kursi aktif menjalankan fungsi ini.

3) Transparansi dan Akuntabilitas Publik;

Sidang pleno disiarkan RTTL, risalah rapat dipublikasi di <http://www.parlamento.tl>. Rakyat bisa dengar langsung menteri ditanyai anggota parlemen. Ada kanal pengaduan rakyat. Ini berbeda total dari sidang tertutup Sidan Umum 1975.

c. PERBANDINGAN SINGKAT FUNGSI PENGAWASAN

Tabel 6. Perbandingan Fungsi Pengawasan

Aspek	Sidan Umum 1975	Parlamento Nacional 2026
Dasar Hukum	Tidak ada, mengandalkan disiplin partai	Konstitusi 2002 Seksi 97 + Tata Tertib
Pemisahan Kekuasaan	Tidak ada, legislatif=eksekutif	Ada, parlemen terpisah dari pemerintah
Instrumen	Teguran internal FRETILIN	Interpelasi, Angket, Pertanyaan, Tolak APBN
Objek	Efisiensi perang dan loyalitas kader	Kebijakan publik, anggaran, HAM
Transparansi	Sidang tertutup, tanpa risalah publik	Sidang terbuka, risalah online
Pelaku	Komite Sentral FRETILIN	65 anggota + 9 Komisi Permanen

Sumber: Diolah dari Dunn (1996), Nicol (2002), CAVR (2005), Konstitusi RDTL 2002, Regimento Parlamento Nacional 2017, La'o Hamutuk (2023), situs resmi Parlamento Nacional.

Kesimpulan: Sidan Umum 1975 tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan modern karena lahir untuk memerdekakan, bukan mengawasi. Logikanya “semua tenaga untuk merdeka”. Parlamento Nacional 2026 justru lahir karena Timor-Leste sudah merdeka, sehingga logikanya “siapa mengawasi penguasa”. Transisi ini penting: dari era “percaya kawan seperjuangan” ke era “percaya tapi verifikasi lewat UU”. Fungsi pengawasan 2026 adalah wujud nyata kedaulatan rakyat yang dulu hanya diproklamasikan Sidan Umum 1975.

1. Konteks Keamanan

Konteks keamanan adalah “ruang” tempat lembaga politik bekerja. Perbedaan konteks keamanan Sidan Umum 1975 dan Parlamento Nacional 2026 menjelaskan mengapa bentuk, kecepatan, dan cara kerja keduanya sangat berbeda.

a. KONTEKS KEAMANAN SIDAN UMUM 1975: DARURAT PERANG DAN EKSTENSIAL

Sidan Umum 20 Mei 1975 di Aileu lahir di tengah krisis keamanan paling parah dalam sejarah Timor-Leste. Ciri utamanya:

1) Ancaman Eksternal-Internal Ganda;

- a) Internal: Perang saudara FRETILIN vs UDT Agustus 1975. Ribuan orang mati, 10.000+ pengungsi ke Timor Barat. Negara hampir pecah sebelum merdeka.
- b) Eksternal: Portugal meninggalkan Timor tanpa transisi. Indonesia mengklaim “integrasi” dan mulai operasi lintas batas sejak Oktober 1975 lewat Operasi Komodo. Ancaman invasi besar sudah nyata saat Sidan Umum berlangsung.

2) Tidak Ada Monopoli Kekerasan Negara;

Tidak ada tentara nasional, polisi, atau peradilan yang mapan. Keamanan dipegang FALINTIL yang baru dibentuk 20 Agustus 1975. Senjata terbatas, logistik serba kurang. Sidan Umum harus rapat berpindah-pindah di hutan Aileu untuk hindari bom. Keamanan fisik pimpinan tidak terjamin.

- 3) Dampak ke Lembaga Politik;
Konteks ini memaksa Sidan Umum bekerja cepat, tertutup, dan sentralistik: 1) Tidak ada waktu pemilu karena bisa diserang kapan saja; 2) Tidak ada debat panjang karena prioritasnya “merdeka atau mati”; 3) Keputusan diambil 3-5 orang inti, bukan 65 orang. Proklamasi 28 November 1975 dipercepat karena intelijen FRETILIN tahu invasi Indonesia 7 Desember 1975 sudah di depan mata. Benar, RDTL 1975 hanya bertahan 17 hari.
 - 4) Logika Keamanan: “Bertahan Hidup Dulu”;
Dalam konteks ini, keamanan = kemerdekaan. Fungsi lembaga politik nomor dua setelah senjata. Jadi Sidan Umum bukan gagal demokratis, tapi dipaksa darurat.
- b. KONTEKS KEAMANAN PARLAMENTO NACIONAL 2026: STABIL DAN KONSTITUSIONAL
- Parlamento Nacional ke-6 2023-2028 bekerja di konteks keamanan paling stabil sejak 1999. Ini “damai pasca-konflik”:
- 1) Stabilitas Internal;
Timor-Leste 2026 sudah 24 tahun merdeka. Konflik bersenjata antar partai sudah berakhir sejak 2008. F-FDTL dan PNTL menjalankan monopoli kekerasan negara. Demonstrasi ada, tapi diselesaikan lewat hukum. Pemilu 2023 berjalan aman, partisipasi 78,7% tanpa kekerasan besar. Krisis politik 2018-2020 selesai lewat mekanisme konstitusi, bukan senjata.
 - 2) Keamanan Eksternal Terjamin;
Ancaman invasi negara lain tidak ada. Hubungan dengan Indonesia dan Australia stabil lewat perjanjian perbatasan maritim 2018. Timor-Leste masuk proses keanggotaan ASEAN. Keamanan nasional dijamin, sehingga parlemen bisa fokus ke pembangunan, bukan perang.
 - 3) Dampak ke Lembaga Politik;
Konteks damai ini membuat Parlamento Nacional bisa bekerja prosedural dan terbuka: 1) Ada waktu 5 tahun untuk debat APBN, revisi UU; 2) Sidang pleno terbuka, disiarkan RTTL; 3) Oposisi FRETILIN 19 kursi aman mengkritik pemerintah tanpa takut ditangkap; 4) 23 anggota perempuan bisa kerja tanpa ancaman fisik. Keamanan memberi “ruang napas” untuk demokrasi deliberatif.
 - 4) Tantangan Keamanan Baru: Non-Militer;
Tantangan 2026 bukan bom atau invasi, tapi: pengangguran pemuda, perubahan iklim, dan korupsi. Fungsi keamanan parlemen bergeser ke mengawasi anggaran ketahanan pangan dan bencana, bukan mobilisasi gerilya.
- c. PERBANDINGAN SINGKAT KONTEKS KEAMANAN

Tabel 7. Perbandingan Konteks Keamanan

Aspek	Sidan Umum 1975	Parlamento Nacional 2026
Jenis Ancaman	Perang saudara + Invasi Indonesia	Stabil, ancaman non-militer
Kontrol Wilayah	95% wilayah, tapi rawan serangan	100% wilayah, F-FDTL/PNTL berkuasa
Lokasi Sidang	Hutan Aileu, berpindah, rahasia	Gedung Parlemen Dili, terbuka, disiarkan

Prioritas Lembaga	Merdeka & Bertahan hidup	Membuat UU & Mengawasi anggaran
Kecepatan Keputusan	Sangat cepat, darurat 17 hari	Prosedural, debat bisa berbulan-bulan
Risiko Pimpinan	Ditangkap/dibunuh musuh	Kritik media dan pemilu 5 tahunan

Sumber: Diolah dari CAVR (2005), Dunn (1996), Nicol (2002), Konstitusi RDTL 2002, La'o Hamutuk (2023), Parlamento Nacional (2023).

Kesimpulan: Sidan Umum 1975 lahir dari “keamanan minus”: tidak ada negara, tidak ada tentara, tidak ada waktu. Jadi wajar bentuknya darurat. Parlamento Nacional 2026 lahir dari “keamanan plus”: ada negara, ada tentara, ada waktu 5 tahun. Jadi wajar bentuknya konstitusional. Perbedaan konteks keamanan ini bukti keberhasilan terbesar Timor-Leste: dari negara yang rapatnya di hutan sambil dengar suara bom, menjadi negara yang sidangnya di gedung marmer sambil disiarkan TV. Damai adalah prasyarat demokrasi, dan itu yang tidak dimiliki Sidan Umum 1975.

2. Hubungan Dengan Rakyat 1975

Hubungan dengan rakyat adalah cara lembaga perwakilan menyerap aspirasi, menjelaskan kebijakan, dan mempertanggungjawabkan kerja. Perbandingan Sidan Umum 1975 dengan Parlamento Nacional 2026 menunjukkan transisi dari “hubungan moral-ideologis” ke “hubungan prosedural-institusional”.

a. HUBUNGAN SIDAN UMUM 1975 DENGAN RAKYAT: HUBUNGAN MORAL DAN MOBILISASI;

Sidan Umum tidak dipilih rakyat, tapi klaimnya mewakili rakyat. Hubungannya bersifat langsung, emosional, dan perang:

1) Saluran: Kampanye Politik dan OMT;

FRETILIN turun langsung ke desa lewat kader dan OMT. Mereka mengajarkan literasi “Alfabeto FRETILIN”, kesehatan dasar, dan ideologi kemerdekaan. Hubungan ini 2 arah: kader mendengar keluhan petani, lalu bawa ke Sidan Umum Aileu. Rakyat desa Maubara, Baucau, Viqueque merasa “FRETILIN adalah kami”. Kepercayaan dibangun lewat kerja bersama di kebun dan front gerilya, bukan lewat kampanye pemilu.

2) Sifat: Partisipatif tapi Tidak Formal;

Rakyat dilibat dalam musyawarah desa untuk menentukan “chefe suco” versi FRETILIN. Tapi tidak ada pemilu, tidak ada hak mencopot anggota Sidan Umum. Jika rakyat tidak setuju, salurannya hanya protes ke kader setempat. Tidak ada surat, tidak ada reses, tidak ada website pengaduan. Hubungan tergantung kedekatan fisik kader dengan rakyat.

3) Keterbatasan: Tertutup dan Krisis;

- Tidak ada media massa independen: Hanya Rádio Maubere. Rakyat hanya dengar versi FRETILIN.
- Tidak ada mekanisme kontrol: Rakyat tidak bisa tanya “kenapa keputusan ini” lewat interpelasi.
- Konteks perang: Hubungan prioritasnya mobilisasi lawan Portugal dan Indonesia, bukan menyerap keluhan harga beras. Jadi hubungan 1975 kuat secara moral, tapi lemah secara hukum dan akuntabilitas.

Intinya: “Kami berjuang untukmu, maka percayalah kami”.

b. HUBUNGAN PARLAMENTO NACIONAL 2026 DENGAN RAKYAT: HUBUNGAN KONSTITUSIONAL DAN AKUNTABEL;

Parlamento Nacional dipilih rakyat 21 Mei 2023. Hubungannya diatur Konstitusi 2002 Seksi 95 dan UU Tata Tertib. Ciri utamanya terlembaga:

- 1) Saluran: Pemilu + Reses + Komisi;
 - a) Pemilu 5 Tahun Sekali: 860.000+ pemilih “mempekerjakan” 65 anggota. Rakyat Baucau pilih CNRT, rakyat Dili pilih FRETILIN. Ini kontrak politik formal.
 - b) Reses 3x Setahun: Setiap anggota wajib turun ke daerah pemilihan 1 dapil nasional. Mereka dengar aspirasi langsung di suco, tulis dalam laporan, lalu bawa ke Komisi.
 - c) Komisi dan Pengaduan: Rakyat bisa kirim surat/petisi ke 9 Komisi Permanen. Komisi C Keuangan wajib dengar keluhan soal APBN desa.
 - d) Media dan Digital: Sidang pleno live di RTTL dan YouTube Parlamento. Website <http://www.parlamento.tl> muat semua UU dan risalah. Rakyat bisa kritik anggota via media sosial.
- 2) Sifat: Formal dan Bisa Dihukum;

Jika anggota parlemen korupsi atau tidak hadir sidang, rakyat bisa: 1) Tidak pilih lagi 2028; 2) Laporkan ke Komisi Etik Parlemen; 3) Gugat lewat pengadilan. Ada akuntabilitas. Anggota FRETILIN 19 kursi sekarang wajib jawab pertanyaan rakyat karena mereka butuh suara untuk periode depan.
- 3) Tantangan: Jarak dan Representasi;

Karena 1 dapil nasional, anggota dari Dili bisa kurang kenal masalah petani di Oecusse. Jarak fisik lebih jauh dibanding kader FRETILIN 1975 yang tinggal serumah dengan rakyat. Ini dibayar dengan sistem reses dan staf ahli, tapi tetap tidak seakrab hubungan 1975.

c. PERBANDINGAN SINGKAT HUBUNGAN DENGAN RAKYAT

Tabel 8. Perbandingan Hubungan dengan Rakyat

Aspek	Sidan Umum 1975	Parlamento Nacional 2026
Dasar Hubungan	Kepercayaan moral “kawan seperjuangan”	Kontrak konstitusional “pemberi mandat”
Saluran Utama	Kader FRETILIN+OMT turun ke desa	Pemilu + Reses + Komisi + Media
Kontrol Rakyat	Tidak ada, hanya protes ke kader	Bisa tidak pilih, interpelasi, lapor etik
Transparansi	Rádio Maubere, tertutup	RTTL live, risalah online, UU publik
Jarak Fisik	Sangat dekat, hidup bersama rakyat	Jauh, tapi diatasi lewat reses rutin
Akuntabilitas	Moral dan ideologis	Hukum, pemilu, dan media

Sumber: Diolah dari CAVR (2005), Dunn (1996), Nicol (2002), Hicks (2015), Konstitusi RDTL 2002, Regimento Parlamento Nacional 2017, La'o Hamutuk (2023), situs resmi Parlamento Nacional.

Kesimpulan: Sidan Umum 1975 punya hubungan “darah dan keringat” dengan rakyat: dekat, cepat, tapi tanpa aturan. Rakyat percaya karena sama-sama berjuang. Parlamento Nacional 2026 punya hubungan “suara dan kertas”: formal, lambat, tapi bisa

diuji dan diganti. Rakyat percaya karena ada pemilu dan UU. Dari “percaya karena sama-sama di hutan” ke “percaya karena sama-sama diatur konstitusi”. Keduanya penting: semangat 1975 memberi jiwa, prosedur 2026 memberi jaminan.

KESIMPULAN

Perbandingan Sidan Umum FRETILIN 1975 dengan Parlamento Nacional 2026 adalah perbandingan antara “cikal bakal kedaulatan” dan “institusionalisasi kedaulatan”. Keduanya sama-sama lembaga perwakilan rakyat Timor-Leste, tapi lahir dari konteks, logika, dan tujuan yang berbeda. Perbedaan itu bukan berarti 1975 gagal atau 2026 sempurna, melainkan bukti perjalanan 50 tahun bangsa ini.

a. DARI LEGITIMASI REVOLUSI KE LEGITIMASI KONSTITUSI

Sidan Umum 1975 mendapat legitimasi dari “darah, perjuangan, dan proklamasi”. Rakyat percaya karena FRETILIN paling depan lawan kolonialisme. Tapi legitimasi itu de facto, rapuh, dan tidak diakui dunia. RDTL 1975 hanya 17 hari.

Parlamento Nacional 2026 mendapat legitimasi dari “suara rakyat dan konstitusi”. 65 anggota dipilih 860.000 pemilih lewat pemilu 2023, kerja di bawah Konstitusi 2002, dan diakui PBB-ASEAN. Legitimasi ini de jure, stabil, dan diperbarui tiap 5 tahun. Dari “kami layak memerintah karena berjuang” ke “kami boleh memerintah karena kamu memilih”.

b. DARI PIMPINAN SENTRALISTIK KE PIMPINAN KOLEKTIF

Struktur Sidan Umum 1975 sederhana dan darurat: dipimpin Komite Sentral FRETILIN, merangkap jadi Dewan Menteri. 2-3 orang kunci seperti Xanana, Nicolau Lobato pegang semua fungsi karena situasi perang.

Struktur Parlamento Nacional 2026 terdiferensiasi dan prosedural: dipimpin Meja 5 orang dipimpin Maria Fernanda Lay, ada 9 Komisi, pemisahan jelas antara legislatif-eksekutif. Dari pimpinan “1 komandan” ke pimpinan “1 tim konstitusional”.

c. DARI PEREMPUAN PEJUANG KE PEREMPUAN PEMIMPIN

Perempuan 1975 lewat OMT berjasa besar di logistik, literasi, dan gerilya, tapi 0% di meja pimpinan Sidan Umum. Isu gender dianggap sekunder.

Perempuan 2026 menguasai 35,4% kursi parlemen = 23 dari 65 anggota. Presiden Parlemen sekarang perempuan. Ada kuota 33% dan Komisi Kesetaraan Gender. Dari “berkorban di belakang layar” ke “memutus UU di meja depan”.

d. DARI PENGAWASAN INTERNAL KE PENGAWASAN KONSTITUSIONAL

Sidan Umum 1975 tidak bisa mengawasi pemerintah karena legislatif dan eksekutif orangnya sama. Pengawasan hanya lewat disiplin partai. Tidak ada waktu untuk itu.

Parlamento Nacional 2026 punya senjata penuh: interpelasi, angket, tolak APBN, pertanyaan ke menteri. Oposisi FRETILIN 19 kursi aktif mengawasi pemerintah. Sidang terbuka, risalah online. Dari “percaya kawan” ke “verifikasi lewat UU”.

e. DARI KEAMANAN MINUS KEAMANAN PLUS

Sidan Umum rapat di hutan Aileu sambil dengar bom karena konteksnya perang saudara + ancaman invasi Indonesia. Prioritasnya bertahan hidup.

Parlamento Nacional sidang di gedung Dili yang disiarkan TV karena konteksnya damai 24 tahun. Ancaman sekarang pengangguran dan iklim, bukan invasi. Damai memberi ruang napas untuk demokrasi.

f. DARI HUBUNGAN MORAL KE HUBUNGAN AKUNTABEL

Hubungan Sidan Umum 1975 dengan rakyat bersifat dekat dan emosional: kader hidup serumah dengan petani, tapi tanpa pemilu dan tanpa mekanisme copot jabatan.

Hubungan Parlamento Nacional 2026 bersifat formal dan akuntabel: lewat pemilu, reses, pengaduan komisi. Jarak fisik lebih jauh, tapi kontrol rakyat lebih kuat lewat kotak suara 2028.

BENANG MERAH DAN PERBEDAAN ESENSIAL:

Tabel 9. Benang Merah dan Perbedaan Esensial

Aspek	Sidan Umum 1975	Parlamento Nacional 2026
Tujuan Utama	Memerdekakan Timor-Leste	Mengelola Timor-Leste merdeka
Konteks	Dekolonisasi darurat, perang	Negara damai, demokrasi konstitusional
Sumber Kuasa	Revolusi dan proklamasi sepihak	Pemilu dan konstitusi 2002
Sifat Kerja	Cepat, tertutup, komando	Prosedural, terbuka, debat
Umur Lembaga	17 hari	5 tahun per periode, berkelanjutan

Sumber: Diolah dari Proklamasi RDTL 28 November 1975, Resolusi Sidan Umum Aileu 20 Mei 1975, Konstitusi RDTL 1975 dan 2002, CAVR (2005), Dunn (1996), Nicol (2002), STAE & CNE (2023), Regimento Parlamento Nacional 2017, La'o Hamutuk (2023), IPU Parline (2024).

Penutup: Sidan Umum 1975 adalah “janji kemerdekaan”. Ia menanam benih kedaulatan rakyat meski lahir tanpa prosedur. Parlamento Nacional 2026 adalah “penunaian janji itu”. Ia menerjemahkan cita-cita 1975 ke dalam UU, pemilu, dan lembaga yang bisa bertahan. Tanpa keberanian Sidan Umum 28 November 1975, tidak akan ada gedung parlemen di Dili hari ini. Dan tanpa parlemen konstitusional 2026, pengorbanan 1975 akan jadi cerita tanpa institusi. Keduanya saling melengkapi: 1975 memberi jiwa, 2026 memberi sistem.

KESIMPULAN

Transformasi dari Sidan Umum FRETILIN 1975 menuju Parlamento Nacional Timor-Leste 2026 merupakan bukti nyata evolusi ketatanegaraan yang sukses, bergeser dari model perwakilan revolusioner-darurat di masa perang menuju pelembagaan demokrasi konstitusional di masa damai. Jika Sidan Umum 1975 bertindak sebagai "cikal bakal kedaulatan" yang sentralistik, homogen, dan berbasis klaim moral perjuangan tanpa pemilu, maka Parlamento Nacional saat ini hadir sebagai "institusionalisasi kedaulatan" yang pluralistik, akuntabel, dan inklusif—terbukti dengan keterwakilan 5 partai politik serta melesatnya angka representasi perempuan hingga mencapai 35,4% di bawah pimpinan perempuan pertama. Perubahan radikal dalam aspek legitimasi elektoral, struktur pemisahan kekuasaan (trias politika), serta keterbukaan metode kerja ini tidak menafikan sejarah masa lalu, melainkan membuktikan bahwa cita-cita abstrak kedaulatan rakyat yang ditanam di hutan Aileu lima dekade lalu telah berhasil

diterjemahkan secara matang ke dalam sistem hukum modern yang stabil dan diakui dunia.

REFERENSI

- Arquivo & Museu da Resistência Timorense. (1975). *Coleção fotográfica do Sidan Umum de Aileu 1975 e do Conselho de Ministros da RDTL*.
- Belo, J. (2014). From Aileu to Dili: Continuity and change in Timorese political representation. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 170(2–3), 1–28.
- CAVR (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação). (2005). *Chega! The report*. CAVR.
- Constituição da República Democrática de Timor-Leste [Konstitusi sementara 21 pasal]. (1975, November 28). Centro de Estudos Timor-Leste.
- Constituição da República Democrática de Timor-Leste [Seksi 92–97, fungsi dan kewenangan Parlamento Nacional]. (2002). Presidência da República. <http://www.presidencia.tl>
- Dunn, J. (1996). *Timor: A people betrayed* (4th ed.). ABC Books.
- Hicks, D. (2015). *Rhetoric and the decolonization of East Timor*. Routledge.
- Inter-Parliamentary Union. (2024). IPU Parline database: Timor-Leste. <http://data.ipu.org>
- Kent, L. (2012). *The dynamics of transitional justice: International models and local realities in East Timor*. Routledge.
- La'o Hamutuk. (2023). Analisis kinerja Parlamento Nacional ke-6 2023–2028: APBN, interpelasi menteri, dan reses anggota. *La'o Hamutuk Bulletin*, 24(3), 1–12.
- Lei Eleitoral para o Parlamento Nacional, Lei No. 6/2006, alterada pela Lei No. 7/2023 [Kuota 33% perempuan dan sistem 1 dapil nasional]. (2023). *Jornal da República*.
- Nicol, B. (2002). *Timor: The stillborn nation* (2nd ed.). Scribe.
- Parlamento Nacional RDTL. (n.d.). Página oficial: Perfil de 65 membros, composição da Mesa Diretora 2023–2028. <http://www.parlamento.tl>
- Proclamação da Independência da República Democrática de Timor-Leste [Teks asli proklamasi oleh Francisco Xavier do Amaral]. (1975, November 28). Arquivo Nacional Timor-Leste.
- Regimento do Parlamento Nacional (Revisão 2017) [Peraturan tata tertib tentang Meja Pimpinan, Komisi Permanen, interpelasi, angket].
- Resoluções do Sidan Nacional da FRETILIN, Aileu, 20 de Maio de 1975. In J. Dunn (1996), *Timor: A people betrayed* (4th ed.). ABC Books.
- Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) & Comissão Nacional de Eleições (CNE). (2023). *Resultados das eleições legislativas de 21 de maio de 2023*. STAE/CNE Timor-Leste.
- UNDP Timor-Leste. (2024). *Gender equality update 2024*. United Nations Development Programme.